



LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2018

Nomor : 700 / 273 / IspTanggal

Tanggal : 24 JANUARI 2019

INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
JALAN PELABUHAN KUALA TUNGKAL 36512

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI	1
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	1
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI	2
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
E. STRUKTUR ORGANISASI	3
F. SUMBER DAYA MANUSIA	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS	6
1. Visi	6
2. Misi	6
3. Tujuan	6
4. Sasaran	7
5. Indikator	7
6. Strategi	7
7. Arah Kebijakan	8
8. Program	9
B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2017	9
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	12
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	13
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	13
2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	17
3. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah	18

4. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	24
5. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Yang Telah dilakukan	25
6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja	28
C. Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	31

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

CASCADING TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

KATA PENGATAR

Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan amanah dari seluruh *stakeholders* Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan bagian dari manajemen pemerintahan tetap tidak dapat melepaskan kewajiban untuk menunjukkan akuntabilitasnya.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dengan mengacu pada Rencana Kinerja (RKT) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018.

LAKIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan public dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

LAKIP Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini memiliki dua fungsi utama, yaitu :

- **Pertama**, sebagai sarana bagi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
- **Kedua**, sebagai sarana evaluasi mandiri (*self evaluation*) atas pencapaian Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai upaya penyempurnaan kinerja di masa mendatang, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta kebijakan.

Dengan demikian kami berharap LAKIP ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa yang akan datang.

Kuala Tungkal, Januari 2019



Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menginformasikan tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2018, dan wujud pertanggungjawaban atas Penetapan Kinerja (Tapkin) yang telah dijanjikan oleh Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan visi dan misi dalam Renstra Tahun 2016 – 2021 yaitu dengan visi sebagai **“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG BAIK”** yang didukung dengan misi :

1. Meningkatkan Pengawasan Internal Secara Berkala;
2. Meningkatkan Kualitas Profesional Aparatur Pengawasan;
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengawasan; dan
4. Meningkatkan Aparatur Yang Bersih, Berwibawa dan Bertanggung Jawab adalah menyelenggarakan pengawasan melekat pada setiap tingkatan birokrasi, sehingga dapat terselenggaranya budaya kerja aparatur yang bermoral, professional, produktif dan bertanggungjawab.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan dan merealisasikan tujuan dan sasaran utama, dengan capaian kinerja pada Tahun 2018 sebesar **100%**, yaitu terdiri atas :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian (%)
Meningkatkan kepatuhan aparaturnya pemerintah daerah terhadap peraturan perundangan	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Persentase tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan	71 %

		Persentase Perangkat Daerah (Eselon II) dengan akuntabilitas kinerja bernilai B	70,97 %
		Tingkat maturitas SPIP	Level 2
	Meningkatnya kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat pendidikan	4 Orang

Capaian kinerja utama atau capaian sasaran Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2018, dari empat IKU ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2018 terdapat tiga IKU yang mencapai target atau berhasil dan satu IKU yang belum mencapaikan kontribusi kepada stakeholders masih perlu ditingkatkan.

Dalam mencapai kinerja tersebut Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2018 didukung dengan dana atau anggaran sebesar Rp. 6.376.446.534,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.061.536.110,00 atau 95,00% disamping itu terdapat dukungan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 30 Pegawai dan sarana prasarana senilai Rp. 216.900.000,00.

Demikian ringkasan ini dibuat, untuk lebih jelasnya akan diuraikan di dalam BAB III LAKIP tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan hal ini menjadi pemicu bagi perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa yang akan datang, demi tercapainya Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksana dibidang pengawasan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kasus dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil Evaluasi APIP.
3. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Pengawasan.
4. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pemeriksaan APIP maupun Eksternal.
5. Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka peranserta Inspektorat sebagai mitra kerja / sebagai Counseling Partner dan Quality Assurance.
7. Berupaya dan berkomitmen dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan KKN sesuai dengan tugas dan fungsinya serta rencana aksi daerah berkenaan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan

evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2. Belum optimalnya cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Obrik/Auditan.
4. Masih terbatasnya jumlah SDM yang profesional, khususnya di bidang pengawasan terkait jabatan fungsional Auditor.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan peran Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, maka Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

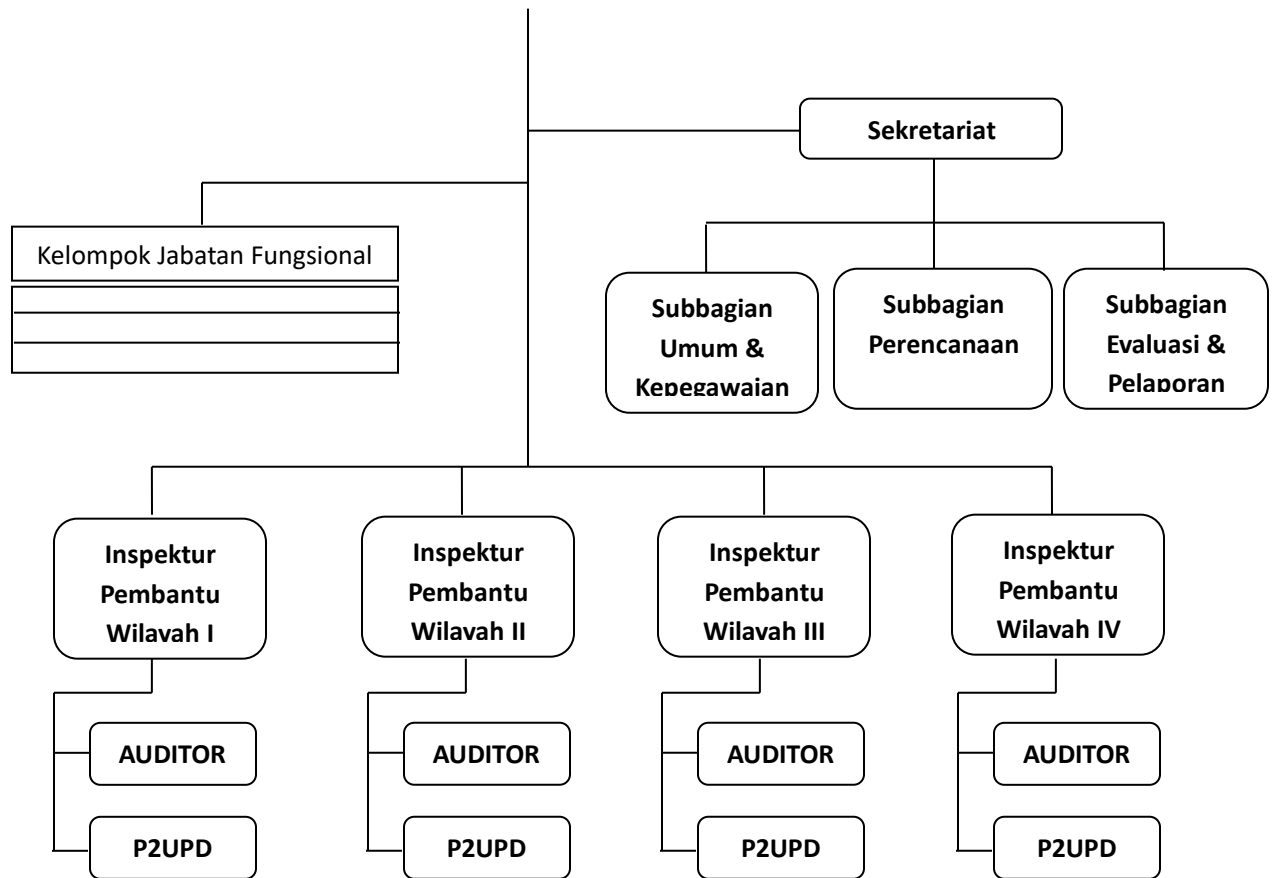
E. STRUKTUR ORGANISASI.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Inspektur selaku Pimpinan Instansi, membawahi :

- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian yaitu :
 1. Subbagian Umum dan Keuangan;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Inspektur Pembantu Wilayah 1 membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan terdiri atas:
 1. Auditor; dan
 2. P2UPD.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah 2 membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan terdiri atas:
 1. Auditor; dan
 2. P2UPD.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah 3 membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan terdiri atas:
 1. Auditor; dan
 2. P2UPD.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah 4 membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan terdiri atas:
 1. Auditor; dan
 2. P2UPD.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada bagan berikut ini :



F. SUMBER DAYA MANUSIA.

Keberhasilan dalam tugas pengawasan sangat tergantung pada sumber daya manusia aparatur sipil negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinnekaan. Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pengawasan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2018 sebanyak 30 orang, dengan klarifikasi berdasarkan golongan, jabatan, serta pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan Golongan	Per 31-12-2017	Tambah	Kurang	Per 30-12-2018
Struktural				
- Eselon II	1	-	-	1
- Eselon III	5	-	-	5
- Eselon IV	3	-	-	3
Fungsional Auditor	4			5
Bendahara Pengeluaran	1	-	-	1
Staf Fungsional	16	-	-	15
Jumlah	30	-	-	30
S-2	5	-	-	5
S-1/DIV	17	-	-	17
D-3	2	-	-	2
SLTA	6	-	-	6
Jumlah	30	-	-	30

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks kehidupan bernegara, Visi memainkan peran yang sangat menentukan didalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi atau organisasi pemerintah harus dibawa agar dapat selalu eksis, penuh inisiatif dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi atau organisasi pemerintah.

1. Visi.

**“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG BAIK“**

2. Misi.

Untuk mewujudkan visi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka misinya adalah :

- (1) Meningkatkan Pengawasan Internal secara berkala.
- (2) Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Aparatur Pengawasan.
- (3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengawasan.
- (4) Meningkatkan aparatur yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab adalah menyelenggarakan pengawasan melekat pada setiap tingkatan birokrasi, sehingga dapat terselenggaranya budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggungjawab

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

- (1) Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan efektif, efisien, transparan dan akuntabel

- (2) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntabilitas instansi pemerintah melalui kerjasama dengan BPKP

4. Sasaran.

Dalam satu unsur pencapaian kinerja yang akan memberikan hasil capaian kinerja yang optima, agar lebih dicapai tingkat keberhasilannya yang sudah ditargetkan, maka Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator - indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- a. Meningkatnya Pengawasan Internal dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan;
- b. Meningkatkan Sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP); dan
- c. Meningkatkan Profesionalisme dan Kapasitas Aparatur Pengawasan Pemerintah dan Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

5. Indikator

- a. Persentase Ketaatan OPD dalam penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern;
- b. Level Kapabilitas APIP; dan
- c. Jumlah APIP yang mengikuti PKS / Bimtek / Sertifikat JFA / P2UPD.

6. Strategi

Strategi yang akan diterapkan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan asistensi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Melaksanakan reviu terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- c. Melaksanakan Audit dan Evaluasi atas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah sesuai dengan Standar Audit dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- e. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi atas Penyelesaian Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.
- f. Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pengawasan internal dan eksternal.
- g. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- h. Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan workshop.
- i. Meningkatkan tersedianya dukungan sarana dan prasarana.

7. Arah Kebijakan.

Arah kebijakan yang akan diterapkan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta tugas pokok dan fungsinya adalah melalui penugasan rutin, penugasan inisiatif dan penugasan permintaan eksternal. Dengan demikian arah kebijakan tersebut diarahkan pada :

- a. Pelaksanaan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- b. Pelaksanaan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan reviu atas Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Pelaksanaan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan audit dan evaluasi Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah.
- d. Memanfaatkan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan fungsional dengan memantapkan peran Inspektorat sebagai Mitra Kerja / Counseling Partner dan Quality Assurance.
- e. Meningkatkan dan menyusun rencana Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal.
- f. Mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh pelaksanaan atas penyelenggaraan kebijakan di bidang pengawasan, baik dengan auditan/ obyek pemeriksaan maupun Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal.
- g. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
- h. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Aparatur Pengawasan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuannya, baik yang bersifat fungsional maupun teknis dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

8. Program.

Dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan indikator-indikator yang akan dicapai, maka diperlukan program - program untuk mencapainya. Program-program tersebut terdiri dari program prioritas dan program penunjang. Program prioritas terdiri dari 3 program, yaitu :

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Sedangkan program penunjang terdiri dari 3 program, yaitu :

- a. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2018

Pada tahun anggaran 2018, rencana kerja tahunan pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja tahun 2018 yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Rencana Kerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan dan Tersedianya sistem informasi surat menyurat berbasis Web	%	100
2	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran	Tidak terjadinya penunggakan pembayaran listrik, telepon dan air	Bulan	12
3	Lancarnya Proses	Pembayaran honor dapat	Bulan	12

	Pencairan Dana	dilaksanakan		
4	Terciptanya suasana kerja yang bersih	Tersedianya alat dan bahan pembersih ruangan kantor	Bulan	12
5	Lancarnya proses pengadministrasian perkantoran	Terpenuhinya alat tulis kantor	Bulan	12
6	Terpenuhinya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12
7	Tersedianya komponen instalasi listrik	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	Bulan	12
8	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan	Tersedianya bahan bacaan, publikasi dan informasi pengawasan	Bulan	12
9	Tersediannya kebutuhan konsumsi untuk tamu, pelaksanaan rapat dan kegiatan	Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu	Bulan	12
10	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SPT	80
11	Bertambahnya masa manfaat gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	gedung	1
12	Bertambahnya masa manfaat kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional	Mobil Motor	3 20
13	Bertambahnya masa manfaat peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin	AC Kom	15 15
14	Meningkatnya disiplin aparatur	Jumlah pakaian Dinas harian (PDH)	Stel	41
15	Terlaksananya pengawasan terhadap tugas pokok dan fungsi	Jumlah pemeriksaan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Obrik	163
16	Terselesaikannya dan pengungkapan kasus pengaduan oleh masyarakat	Jumlah penanganan kasus pengaduan yang ditindak lanjutnya (bila ada kasus pengaduan)	Kasus	14
17	Terlaksananya monitoring hasil pengawasan internal	Persentase rekomendasi BPK RI, BPKP, Itjen Kementerian, Itprov, Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan	%	100
18	Kinerja APIP	Terlaksananya Rakerwasda serta tersusunya PKPT Tahun 2018	pemeriksaan	12
19	Evaluasi Hasil Pengawasan APIP & BPK	Jumlah rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti	Rekomendasi	761
20	Terlaksananya Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	Jumlah tuntutan yang diselesaikan	Sidang Majelis	8
21	Penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Tanjab Barat tepat waktu	Tersusunnya laporan keuangan Pemkab sesuai SAP	LHR	1
22	Tercapainya Pengawasan	Jumlah Sosialisasi /	Pendampingan	5

	Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Pendampingan		
23	Tercapainya Program Prioritas Nasional	Jumlah Sosialisasi / Pendampingan	Pendampingan	8
24	Meningkatnya tenaga teknis pengawasan yang profesional	Jumlah APIP yang mengikuti PKS/BIMTEK/Sertifikat JFA/P2UPD	orang	30

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Berdasarkan program dan kegiatan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perjanjian kinerja tahun 2018 pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta program dan kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut. Berikut perjanjian kinerja tahun 2018 pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Persentase tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan	%	100
		Persentase Perangkat Daerah (Eselon II) dengan akuntabilitas kinerja bernilai B	%	90
		Tingkat maturitas SPIP	Level	2
2	Meningkatnya kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat pendidikan	Orang	4

AKUNTABILITAS KINERJA

D. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui formulir Pengukuran Kinerja (PK) sebagaimana disajikan pada lampiran 1 dan 2.

Indikator kinerja sasaran dan program telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra. Indikator Kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran telah diuraikan dalam Bab II. Sedangkan indikator kinerja program atau Indikator Kinerja Utama meliputi: persentase ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi, revidi dan pemeriksaan.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2018 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2018 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen Tapkin tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, capaian kinerja inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 4

Realisasi dan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Persentase tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan	%	100
		Persentase Perangkat Daerah (Eselon II) dengan akuntabilitas kinerja bernilai B	%	90
		Tingkat maturitas SPIP	Level	2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	Meningkatnya kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat pendidikan	Orang	4

E. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Berdasarkan pencapaian dari target dan realisasi yang telah ditetapkan pada tabel 7 diatas, maka dapat dijelaskan melalui analisis atas sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dicapai, yaitu sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Persentase tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan	%	100
		Persentase Perangkat Daerah (Eselon II) dengan akuntabilitas kinerja bernilai B	%	90
		Tingkat maturitas SPIP	Level	2
2	Meningkatnya kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat pendidikan	Orang	4

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada tahun 2018 dan atau tahun-tahun selanjutnya (*performance improvement*).Capaian atas IKU Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis.

Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan indikator kerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Reguler

Hasil pencapaian kinerja atas kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Sat.	Cap.2018		Capaian Kinerja	
		Target	Real	2018	2017
Laporan Hasil Audit Operasional	Lap	163	135	98,54	99

Laporan hasil audit operasional disajikan dalam bentuk Bab, dimaksudkan untuk melaporkan hasil audit atas pelaksanaan tugas dan kegiatan secara menyeluruh meliputi aspek tugas pokok dan fungsi dan aspek-aspek pendukungnya, ditambah uraian singkat hasil audit/evaluasi lainnya (laporan audit operasional proyek).

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.301.540.000.00 dengan realisasi sebesar Rp.1.282.534.000,00 atau 98,54%. Target *output* dari kegiatan ini adalah 100%.

b. Reviu Laporan Keuangan

Hasil pencapaian kinerja atas kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Sat.	Cap.2018		Capaian Kinerja	
		Target	Real	2018	2017
Laporan Hasil Ev. SPIP	Lap	1	1	100 %	76 %

Laporan hasil reviu adalah *output* dari penugasan Reviu Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Target sebesar dua laporan dirinci dalam RKT berupa Reviu Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018.

c. Pemeriksaan Khusus

Hasil pencapaian kinerja atas kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Sat.	Cap. 2018		Capaian Kinerja	
		Target	Real	2018	2017
Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	Lap	14	14	100 %	48 %

Laporan hasil pemeriksaan khusus adalah *output* dari penugasan Audit Khusus dilakukan karena adanya informasi awal yang berasal dari :

- Surat pengaduan masyarakat melalui disposisi Bupati atau diterima langsung oleh Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Pengembangan dari temuan pemeriksaan reguler yang sedang/telah dilakukan;
- Permintaan tertulis dari unit kerja di lingkungan Pemda Kabupaten Tanjung

Jabung Barat; dan

- Pemeriksaan khusus dilaksanakan setelah ada disposisi Bupati / Inspektur.

Penanganan informasi awal hasil dari Penelaahan Surat Pengaduan melalui disposisi Bupati / Inspektur. Tim bertugas menelaah kecukupan informasi awal dalam rangka memberikan masukan kepada Inspektur berupa simpulan cukup/tidak cukup alasan dilakukan pemeriksaan khusus, dengan mempertimbangkan materi dan kelengkapan informasi, serta potensi kebenaran pengaduan.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.280.590.000.00 dengan realisasi sebesar Rp.279.490.000,00 atau 99,61%. Target *output* dari kegiatan ini adalah 100% Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 49%, sehingga kinerjanya sebesar 50%. Hasil ini diperoleh dari perbandingan antara realisasi sampai dengan target penyelesaian tindak lanjut yang ditetapkan tahun 2017 sebesar 48%.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 75,60% menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2018 menunjukkan penurunan.

d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan

Hasil pencapaian kinerja atas kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Sat.	Cap.2018		Capaian Kinerja	
		Target	Real	2018	2017
- Temuan BPK	%	38	19	37	17
- Temuan APIP	%	723	446	606	62

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.240.520.000.00 dengan realisasi sebesar Rp.232.471.750,00 atau 96,65%. Target *output* dari kegiatan ini adalah 100% Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 49%, sehingga kinerjanya sebesar 50%. Hasil ini diperoleh dari perbandingan antara realisasi sampai dengan target penyelesaian tindak lanjut yang ditetapkan tahun 2017 sebesar 50%.

Realisasi sebesar 50% merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah rekomendasi (kejadian) yang telah ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 19 rekomendasi (kejadian) yang tertuang dalam LHA BPK-RI sampai dengan Semester II Tahun 2017 sebanyak 38 kejadian.

Realisasi penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI sebesar Rp.

34.740.227.685,53 (37%) dari jumlah temuan sebesar Rp. 94.323.147.526,35 hal ini capaian hasil penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI masih sangat rendah. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan monitoring tindak lanjut perlu ditindaklanjuti pada tahun 2018.

e. Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan Yang Terealisasi

Sistem perencanaan pengawasan merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen dukungan yang berperan penting dalam membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan teknis Inspektorat dan didukung dengan Program “**Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**”. Indikator pengukuran atas kinerja program ini yaitu :

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat.	Cap.2018		Capaian Kinerja	
			Target	Real	2018	2017
1)	Persentase jumlah rencana penugasan yang terealisasi	%	100	99,20	99	90

Dalam tahun 2018 Capaian kinerja sebesar 100% dan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari realisasi penugasan sebesar 99,20% telah mencapai target Renstra 2018 sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 90%. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

f. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan

Hasil pencapaian kinerja atas kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Sat.	Cap.2018		Capaian Kinerja	
		Target	Real	2018	2017
Pengiriman Peserta Diklat	%	23	14	14	70
Diklat/PKS/Bintek	%	30	30	30	80

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.133.242.500,00, dengan realisasi sebesar Rp.116.812.500,00 atau 87,67%. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebanyak 23 orang sedangkan. Realisasi pengiriman Peserta sebanyak 14 orang disamping pengiriman peserta keluar Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melaksanakan Diklat Pengawasan, Bintek / Pelatihan Kantor Sendiri sebanyak 4 kali dan realisasi pelaksanaannya 2 kali atau 50%.

Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 30 Desember 2018 sebanyak 30 pegawai, dengan klarifikasi berdasarkan golongan, jabatan, serta pendidikan sebagai berikut :

Berdasarkan Golongan	Per 31-12-2016	Tambah	Kurang	Per 30-12-2017
Struktural				
- Eselon II	1	-	-	1
- Eselon III	5	-	-	5
- Eselon IV	3	-	-	3
Fungsional Auditor	4			5
Bendahara Pengeluaran	1	-	-	1
Pengelolaan BMN	1	-	-	1
Staf Fungsional	11			10
Calon Auditor	4	-	-	4
Jumlah sebelum Koreksi	30			30
Koreksi :				
Pengelola BMN				
Jumlah setelah Koreksi				

Berdasarkan Golongan	Per 31-12-2017	Tambah	Kurang	Per 31-12-2018
S-2	5	-	-	5
S-1/DIV	17	-	-	17
D-3	2	-	-	2
SLTA	6	-	-	6
Jumlah sebelum Koreksi	30	-	-	30
Koreksi :				
D-3				
Jumlah setelah Koreksi				

2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja, maka dapat disampaikan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dan tahun lalu/ sebelumnya dan beberapa tahun terakhir adalah sebagaimana tabel 5 berikut ini.

Tabel 5
Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	Kegiatan	2018	2017	Capaian
----	---------	-----------	----------	------	------	---------

	Strategis									Kinerja Naik/Turun			
				T	R	%	T	R	%				
1	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pemeriksaan Kasus Pengaduan	14	17	121	25	12	48				
			Reguler/ sertijab	163	135	83	163	162	99.4				
			Sidak	-	-	-	-	-	-				
			Dana BOS	13	5	38	13	13	100				
			Dana Desa	13	12	92	13	10	77				
			Review Laporan Keuangan	1	1	100	1	1	100				
			Reviu/Evaluasi SAKIP	31	31	100	31	31	100				
			Monitoring Bansos	-	-	-	-	-	-				
			Monitoring Penutupan Kas	31	31	100	57	57	100				
			Pre-audit/monitoring khusus	-	-	-	-	-	-				
			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP :										
			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	723	505	70	723	446	62				
			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi	-	-	-	-	-	-				
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	38	37	98	38	19	50							
Jumlah				1814	1342	873	1825	1216	797				

3. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan terget jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang juga dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 dapat dijelaskan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6
Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018
dan Target RPJMD Tahun 2019

Kode	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														PD PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2016		Tahun 2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)			
				TARGET	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar		100%	870.300.000	100%	457.316.200	100%	457.316.200	100%	457.316.200	100%	457.316.200	100%	457.316.200	100%			Inspektorat
	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat terkirim Tersedianya sistem informasi surat menyurat berbasis Web		100%	9200.000	100%	1 sistem	100%	1 sistem	100%	1 sistem	100%	1 sistem	100%	1 sistem	100%	1 sistem	1 sistem	Inspektorat
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tidak terjadinya penunggakan pembayaran listrik, telepon dan air		100%	96.600.000	100%	80.400.000	100%	80.400.000	100%	80.400.000	100%	80.400.000	100%	80.400.000	100%			Inspektorat
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honor dapat dilaksanakan		100%	97.900.000	100%	71.750.000	100%	71.750.000	100%	71.750.000	100%	71.750.000	100%	71.750.000	100%			Inspektorat
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat dan bahan pembersih ruangan kantor		100%	26.600.000	100%	10.522.496	100%	10.522.496	100%	10.522.496	100%	10.522.496	100%	10.522.496	100%			Inspektorat
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		100%	100.200.000	100%	50.209.700	100%	50.209.700	100%	50.209.700	100%	50.209.700	100%	50.209.700	100%			Inspektorat

Inspektorat Kab. Tanjab Barat

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Menciptakan kenyamanan kerja aparatur pengawasan		100%	460.600.000	100%	64.500.000	100%	64.500.000	100%	64.500.000	100%	64.500.000	100%	64.500.000	100%	Inspektorat
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor		100%	106.600.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	Inspektorat
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional		100%	266.000.000	100%	190.400.000	100%	190.400.000	100%	190.400.000	100%	190.400.000	100%	190.400.000	100%	Inspektorat
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Menciptakan kenyamanan kerja aparatur pengawasan		100%	24.500.000	100%	10.500.000	100%	10.500.000	100%	10.500.000	100%	10.500.000	100%	10.500.000	100%	Inspektorat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		100%	42.400.000	100%	15.375.000	100%	15.375.000	100%	15.375.000	100%	15.375.000	100%	15.375.000	100%	Inspektorat
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian Dinas harian (PDH)		100%	42.400.000	100%	15.375.000	100%	15.375.000	100%	15.375.000	100%	15.375.000	100%	15.375.000	100%	Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan Pemerintah Daerah Kab/Kota		100%	2.567.220.000	100%	2.810.645.000	100%	2.926.949.500	100%	2.926.949.500	100%	2.926.949.500	100%	2.926.949.500	100%	Inspektorat

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Persentase penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)		100%	1.731.400.000	100%	1.785.900.000	100%	1.802.204.500	100%	1.802.204.500	100%	1.802.204.500	100%	1.802.204.500	100%	Inspektorat
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat penyelesaian kasus dan tindaklanjutnya		100%	226.250.000	100%	297.125.000	100%	397.125.000	100%	397.125.000	100%	397.125.000	100%	397.125.000	100%	Inspektorat
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase rekomendasi BPK RI, BPKP, Itjen Kementerian, Itprov, Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan		100%	325.400.000	100%	345.400.000,-	100%	345.400.000,-	100%	345.400.000,-	100%	345.400.000,-	100%	345.400.000,-	100%	Inspektorat
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya Rakerwasda serta tersusunya PKPT		100%	70.000.000	100%	71.050.000	100%	71.050.000	100%	71.050.000	100%	71.050.000	100%	71.050.000	100%	Inspektorat
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Penurunan jumlah rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti		100%	132.750.000	100%	192.750.000	100%	192.750.000	100%	192.750.000	100%	192.750.000	100%	192.750.000	100%	Inspektorat
Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	Terlaksananya penyelesaian TP TGR		100%	81.420.000	100%	117.420.000	100%	117.420.000	100%	117.420.000	100%	117.420.000	100%	117.420.000	100%	Inspektorat
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Level Kapabilitas APIP		100%	84.905.400	100%	406.050.500	100%	4.622.091.200	100%	5.072.091.200	100%	5.072.091.200	100%	5.072.091.200	100%	Inspektorat

Inspektorat Kab. Tanjab Barat

Evaluasi Laporan Keuangan Pemkab Tanjab Barat	Tersusunnya laporan keuangan Pemkab sesuai SAP		100%	84.905.400	100%	84.900.500	100%	84.900.500	100%	84.900.500	100%	84.900.500	100%	84.900.500	100%		Inspektorat
Saber Pungli	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan		100%	-	100%	221.150.000	100%	271.150.000	100%	271.150.000	100%	271.150.000	100%	271.150.000	100%		Inspektorat
Sosialisasi Pembentukan Sentra Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Terlaksananya Pencegahan TP4D		100%	-	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	105.000.000	100%	105.000.000	100%	105.000.000	100%		Inspektorat
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti PKS/ BIMTEK / Sertifikat JFA / P2UPD	4 org	4 org	200.000.000	4 org	160.000.000	4 org	160.000.000	29 org	310.000.000	29 org	310.000.000	29 org	310.000.000	29 org		Inspektorat
Kegiatan Kursus, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Peningkatan sumber daya aparatur pemeriksa	4 org	4 org	200.000.000	4 org	160.000.000	4 org	160.000.000	29 org	310.000.000	29 org	310.000.000	29 org	310.000.000	29 org		Inspektorat
Jumlah				5.223.825.400		4.130.786.700		5.223.825.400		5.223.825.400		5.223.825.400		3.991.040.700			Inspektorat

Analisis dan evaluasi sasaran adalah hasil-hasil perhitungan dari pengukuran kinerja yang ditetapkan berbanding dengan realisasi yang dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang telah dibuat dalam penetapan kinerja dan indikator kinerja utama sesuai dengan program dan kegiatan, dan hal ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran strategis, indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum pencapaian sasaran dan indikator kinerja pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2017 dan 2018 dan target tahun 2019 sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan komitmen pejabat eselon II dengan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat, dapat dijelaskan melalui dan analisis dan evaluasi sasaran terhadap indikator kinerja utama.

Berdasarkan tabel realisasi tahun ini dan target jangka menengah yang berdasar dalam dokumen perencanaan strategis organisasi tersebut diatas, bahwa realisasi pada tahun 2018 yang merupakan Rencana Strategis tahun pertama dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahwa pencapaian yang diharapkan dari indikator-indikator yang telah ditetapkan targetnya ada yang bersifat positif dan negatif dalam peningkatan dalam tugas Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku aparat pengawasan.

4. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.

Kalau dilihat dari tabel 8 tersebut diatas, mengenai realisasi kinerja tahun 2018 yang telah dicapai atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dibanding dengan Standar Nasional, ada beberapa indikator kinerja yang capainya belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti :

- Opini atas Laporan Keuangan Pemda Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah dicapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), baru dicapai 60% yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dari laporan keuangan yang telah dibuat.
- Skor rata-rata Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD dan Pemerintah Kab/Kota dari Standar Nasional diharapkan adalah skor 70-80 dengan kategori BB/Sangat Baik atau A/Memuaskan, baru dapat dicapai dengan skor 66,92 dengan kategori B/Baik.

- Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi dari Standar Nasional diharapkan telah dicapai 100 %, yaitu dari 9 Kabupaten/Kota yang dievaluasi pada tahun 2018 sudah mendapat kategori Sangat Tinggi. Namun secara kuantitatif capaian per indikator kinerja yang telah ditetapkan ada juga yang sudah tercapai 80% - 100%, bahkan ada juga beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut telah melampaui target diatas 100%. Terhadap beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target akan diupayakan peningkatannya melalui beberapa perbaikan-perbaikan dan peningkatan kinerja.

5. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Yang Telah dilakukan.

Beberapa keberhasilan dan kegagalan yang menyebabkan peningkatan dan penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada 31 OPD yang ditargetkan skor peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja OPD rata-rata sebesar 70 skor, telah dicapai rata-rata sebesar 66,92 skor dengan kategori B/Baik dengan capaian 68,94%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 5 indikator penilaian atas akuntabilitas kinerja SKPD yang telah ditetapkan belum tercapai sesuai dengan target, antara lain dari segi perencanaan kinerja target, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi serta pencapaian kinerja. Dari hasil evaluasi atas 5 komponen tersebut menunjukan peningkatan dari B/Baik dengan nilai 63,88 di tahun 2016 dan B/Baik dengan nilai 68,94 di tahun 2017. Pencapaian ini memang belum signifikan, namun telah terjadi peningkatan capaian. Pencapaian ini akan terus ditingkat dengan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan yang rekomendasikan.

Sedangkan atas akuntabilitas kinerja Kab/Kota pada tahun 2018 telah dilaksanakan evaluasi pada 10 OPD dan ditargetkan skor peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Kab/Kota rata-rata 70 skor dan telah dicapai rata-rata 61,44 skor dengan kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa dari 5 indikator penilaian atas akuntabilitas kinerja telah ditetapkan belum tercapai sesuai dengan target. Pencapaian ini memang belum signifikan, namun telah terjadi

peningkatan capaian. Pencapaian ini akan terus ditingkat dengan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan yang rekomendasikan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2018 memang terjadi peningkatan, namun belum signifikan, baik SKPD dan Kab/Kota. Peningkatan ini belum sesuai dengan target yang diharapkan dan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diharapkan pada tahun-tahun mendatang diperlukan adanya perencanaan kinerja yang baik, pengukuran kinerja yang akurat, pelaporan kinerja yang tepat waktu dan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang berkelanjutan dan adanya perbaikan terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan.

2. Pada tahun 2018 jumlah pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 14 pengaduan/laporan dan dapat ditangani penyelesaiannya 100%. Dari tahun ke tahun jumlah pengaduan masyarakat yang masuk diharapkan terus menurun dan dapat ditangani penyelesaiannya. Hal ini disebabkan adanya perbaikan – perbaikan pada sistem kinerja pemerintahan sudah memadai dan bersifat transparan, sistem kinerja yang telah menerapkan aplikasi yang berbasis website, meningkatnya pengendalian intern yang dilakukan oleh SKPD. Penanganan penhaduan ini juga merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Aparatur pengawasan bersertifikat, pada tahun 2018 telah dicapai jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat (Auditor/P2UPD) berjumlah 1 orang, hal ini bila dibandingkan dengan jumlah SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 31 OPD/Unit Kerja sangat tidak sebanding dengan beban kerja / tugas Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang semakin berat dan kompleks. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang sampai dengan berakhirnya perencanaan strategis, jumlah aparatur pengawasan akan terus ditingkatkan menjadi 30 orang. Peningkatkan ini dapat dilakukan melalui rekrutmen pegawai melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mutasi antara PNS baik dalam provinsi maupun dari Kab/Kota serta selalu meningkatkan kapasitas aparatur pengawasan baik melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Cakupan pengawasan yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah 80 % dari jumlah OPD yang ada. Capaian ini akan terus ditingkat sejalan dengan

peningkatan jumlah SDM pengawasan dan program/kegiatan pengawasan yang terus meningkat. Sampai dengan berakhirnya perencanaan strategis diharapkan cakupan pengawasan akan dapat capai sebesar 100%, harapan ini sejalan dengan peningkatan jumlah SDM aparatur pengawasan dan peningkatan program/kegiatan pengawasan dan dukungan anggaran di bidang pengawasan.

5. Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan, pada tahun 2018 telah dicapai 100%. Capaian ini akan terus dipertahankan sesuai dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan disesuaikan program pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Bupati. Harapan ini sejalan dengan peningkatan jumlah SDM pengawasan dan memfokuskan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
 6. Skor rata-rata penerapan SPIP SKPD, pada tahun 2018 pencapaian skor penerapan SPIP baru 2 skor dari 3 skor yang akan dicapai sampai dengan tahun 2019 sesuai dengan target secara Nasional. Upaya-upaya kearah tersebut telah dilakukan antara lain melakukan Maturitas SPIP, Penilaian Risiko terhadap semua program dan kegiatan, pembentukan Tim Penyusunan Pedoman Penilaian Risiko dan Pembuatan Surat Edaran Bupati berkenaan dengan Penilaian Risiko dan Pembuatan Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 7. Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu, pada tahun 2018 telah dicapai 100% dari penugasan yang telah dilaksanakan. Pencapaian ini akan terus ditingkatkan dan dipertahankan, hal ini akan komitmen dari Auditor untuk menyelesaikan laporan hasil pengawasan sebelum adanya tugas-tugas pengawasan lainnya. Sampai dengan berakhir perencanaan strategis, hal ini akan terus ditingkatkan tingkat penyelesaiannya sampai 100% dengan harapan adanya dukungan dari Pimpinan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan membatasi pelaksanaan tugas-tugas diluar pengawasan, sehingga dapat dicapai penyelesaian laporan hasil pengawasan yang tepat waktu.
- 6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.**

Sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pencapaian perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2018 dengan dukungan sumber daya aparatur pengawasan sebanyak 30 orang yang terbagi dengan Pejabat Fungsional Pengawasan sebanyak 4 orang masih sangat dirasakan kurang, namun dari semua dukungan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki akan dimaksimalkan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari segi efisiensi sumber daya yang ada rasanya tidak ada yang perlu diefisiensikan, karena dukungan sumber daya ada masih dirasakan kurang.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian perjanjian kinerja tahun 2018 adalah dibagi dalam 2 program dan kegiatan, yaitu yang bersifat prioritas dan penunjang. Program dan Kegiatan prioritas inilah yang lebih banyak mendukung pencapaian perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018. Program dan Kegiatan prioritas tersebut adalah :

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
 - Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
 - Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
 - Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
 - Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
 - Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi
- b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
 - Evaluasi Laporan Keuangan Pemkab Tanjab Barat
 - Saber Pungli
 - Sosialisasi Pembentukan Sentra Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
- c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - Kegiatan Kursus, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Program dan Kegiatan penunjang dalam pencapaian perjanjian kinerja tahun

2018, adalah :

- a. Program Pelayanan administrasi perkantoran
 - Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Kegiatan Penyedia Barang cetakan dan penggandaan
 - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
 - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
 - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Apartur
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Dari beberapa program dan kegiatan yang tersebut diatas, ada 3 program dengan 10 kegiatan yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan utama dalam mendukung pencapaian/keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018.

F. Realisasi Anggaran

Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Barat untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dibiayai melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat(DPA – SKPD) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersumber pada APBD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian Jumlah Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Dana)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Ket
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	3.900.000 131.699.990 86.750.000 10.522.496 50.209.700 22.230.000 4.876.300 9.600.000 4.200.000 729.832.500	2.936.800 91.739.569 86.749.000 10.507.271 50.155.860 22.065.000 4.801.410 7.840.000 4.140.000 729.271.333	963.200 39.960.421 1.000 15.225 53.840 165.000 74.890 1.760.000 60.000 561.167	Sisa UUDP telah disetor ke Kas Daerah
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/barkala peralatan gedung kantor	234.100.000 190.400.000 16.000.000 10.500.000	231.600.000 149.522.085 15.874.000 10.480.000	2.500.000 40.877.915 126.000 20.000	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR - Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	15.375.000	15.375.000	-	
4	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH - Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala - Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda - Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif - Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan - Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi	1.301.540.000 280.590.000 240.520.000 4.260.000 62.400.000 65.440.000	1.282.534.000 279.490.000 232.471.750 3.700.000 44.435.000 65.440.000	19.006.000 50.000 8.048.250 560.000 17.965.000 -	
5	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN - Review/Evaluasi Laporan Keuangan Pemkab Tanjab Barat - Saber Pungli - Sosialisasi Pembentukan Sentra Tim dan Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	32.665.500 184.530.000 148.050.000	32.665.500 181.779.139 146.958.550	- 2.750.861 1.091.450	
6	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN - Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	133.242.500	116.812.500	16.430.000	
Jumlah		3.973.433.986	3.819.343.767	154.090.219	

PENUTUP



elama tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin, terutama dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan

Dengan didukung anggaran atau pembiayaan yang cukup. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk melaksanakan tupoksi. Ketercapaian target yang terealisasi tidak terlepas dari adanya dukungan manajemen Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selalumelaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang diembannya dengan penuh tanggung jawab.

Tingkat keberhasilan atas indikator kinerja utama (sasaran) sebagaimana dimuat dalam Renstra dan Tapkin Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat disimpulkan secara umum capaian kinerja tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telah berhasil, hal ini didukung dengan keberhasilan atas indikator kinerja kegiatan atau 75,60% yang capaian kinerja kegiatan mencapau target yang ditetapkan dalam Renstra atau Tapkin tahun 2018. Meskipun demikian masih terdapat indikator kinerja kegiatan yang mendukung sasaran tersebut masih belum mencapai hasil yang optimal atau masih dibawah target yang ditetapkan tahun 2017. Hal ini menjadi tantangan dan bahan perbaikan terkait kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang.